



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



Joemarthine Chandra

**Ketua Bidang
Strategi dan Riset**

Joemarthine Chandra, S.H., M.H., adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia periode 2026–2030 yang kini dipercaya memimpin Bidang Strategi dan Riset. Joemarthine membangun rekam jejak panjang di bidang hukum, advokasi, dan keterbukaan informasi publik.

Joemarthine Chandra menempuh pendidikan S-1 Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya (2005), melanjutkan S-2 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (2023), dan kini tengah menempuh program doktoral Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta. Selain pendidikan formal, Joemarthine juga mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PERADI, 2007) serta pelatihan mediator di Pusat Mediasi Indonesia, Universitas Gadjah Mada (2022).

Karier profesionalnya berakar dari dunia advokat sejak 2010, Joemarthine banyak mengadvokasi dan membela kepentingan masyarakat menengah kebawah dan mendirikan Rumah Keadilan Ampera sebagai wadah perjuangan. Ia juga pernah menjadi Staf Ahli DPRD Kabupaten Ogan Ilir (2011–2014). Pengalaman tersebut memperkuat kapasitasnya dalam memahami dinamika hukum dan kebijakan publik.

Di ranah keterbukaan informasi, Joemarthine menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi Sumatera Selatan selama dua periode (2020–2024 dan 2024–2028), sebelum diamanahkan sebagai Komisioner KI Pusat pada tahun 2026. Peran ini menegaskan konsistensinya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah maupun nasional.

Selain kiprah profesional, ia aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, mulai dari Korps Alumni HMI (KAHMI), Nahdlatul Ulama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Selatan, serta berperan aktif juga di beberapa organisasi olahraga seperti PTMSI dan IPSI Sumatera Selatan.

Dengan kombinasi pengalaman advokasi, kepemimpinan organisasi, dan riset hukum, Joemarthine Chandra menghadirkan perspektif strategis dalam memperkuat regulasi dan riset kebijakan keterbukaan informasi publik.